



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Simboro, Mamuju,  
Sulawesi Barat WA Live Chat. 0823-9888-8900  
website <https://sulbar.bpk.go.id>,  
Sosial Media X, Instagram, Youtube, TikTok: @bpkrisulbar

**SIARAN PERS**

---

**PENYERAHAN LHP ATAS LKPD TA 2023  
PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

***Mamuju – Humas dan TU Perwakilan***

**Senin (03/06)** – sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun Anggaran (TA) 2023 yang ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPD Provinsi Sulawesi Barat.

Atas pemeriksaan tersebut, Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan (APP) pada Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI BPK RI **Dwi Sabardiana**, didampingi Plh Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Barat, **Muhammad Ali Porseni Baso**, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi Sulawesi Barat TA 2023 beserta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2023 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Barat kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, **Sitti Suraidah Suhardi** dan Pj. Gubernur Sulawesi Barat, **Bahtiar Baharuddin**.

Dalam sambutannya, Kepala APP AKN VI BPK RI menyampaikan bahwa Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Sulawesi Barat TA 2023 dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD dengan memperhatikan empat kriteria yaitu (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (2) Kecukupan pengungkapan; (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan dengan memperhatikan Standar Pemeriksaan dan Tingkat Materialitas atas LKPD Provinsi Sulawesi Barat TA 2023, BPK RI memberikan Opini **“Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP)**. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPD Provinsi Sulawesi Barat TA 2023 yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk segera diperbaiki dan ditindaklanjuti antara lain (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki Kebijakan Akuntansi atas Akun Properti Investasi; (2) Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan tidak sesuai ketentuan; dan (3) Kelebihan pembayaran atas Sembilan Paket Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada tiga SKPD, dan Kekurangan Penerimaan atas Jaminan Pelaksanaan yang Tidak Dicairkan.

Lebih lanjut, Dwi mengucapkan selamat atas pencapaian opini WTP untuk Kesepuluh



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Simboro, Mamuju,  
Sulawesi Barat WA Live Chat. 0823-9888-8900  
website <https://sulbar.bpk.go.id>,  
Sosial Media X, Instagram, Youtube, TikTok: @bpkrisulbar

## **SIARAN PERS**

---

kalinya yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan berharap agar DPRD dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaan ini, terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, serta mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menindaklanjuti Rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima, mengingat persentase Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan BPK RI oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 62,67% masih di bawah standar nasional yaitu minimal 75%. Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan IHPD Tahun 2023 yang memuat ringkasan atas 22 Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2023 yang meliputi 7 LHP LKPD, 5 LHP Kinerja, dan 10 LHP Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan enam Kabupaten di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**